

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t untuk manusia, dimana perkawinan merupakan suatu permasalahan yang cukup mendasar yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu sarana dalam membentuk keluarga. Perkawinan juga merupakan suatu kodrat dari Allah s.w.t yang ditujukan kepada manusia untuk memenuhi hasrat seksualnya. Dalam perkawinan telah memuat unsur sakral didalamnya, karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tidak hanya masalah yang mendasar bagi kehidupan manusia, perkawinan juga merupakan perbuatan yang mulia, karena perkawinan mampu menyatukan batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.²

Dalam Agama Islam, perkawinan adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah s.w.t. lantaran perkawinan adalah cara untuk melestarikan keturunan manusia demi mencapai kebahagiaan yang nyata dalam hidup.³ Kedudukan perkawinan sangat penting menurut Agama Islam, karena perkawinan telah mengatur mengenai banyak hal didalamnya, sehingga dalam perkawinan tidak hanya mengatur tentang tata pelaksanaannya saja.⁴

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 29

² Linda Azizah. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 4. Juli. 2012, hal 415

³ As-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunna*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1973) , hal 11

⁴ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 3

Anjuran dalam melakukan perkawinan juga memiliki hikmah yang dapat dirasakan manfaatnya, sesuai dengan Q.S. Ar-Ra'd: 38, yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

*Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan suatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. Q.S. Ar-Ra'd: 38”*⁵

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki derajat yang lebih tinggi diantara makhluk Allah s.w.t yang lain. Oleh karena itu, perkawinan yang sah akan memberikan dampak yang baik pula terhadap terlaksananya pergaulan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Selain itu melaksanakan perkawinan juga bertujuan untuk menambah keturunan, sehingga manusia mampu melangsungkan serta meneruskan kehidupan berkeluarga secara runtut.⁶

Ulama memberikan pendapat mengenai hukum dari perkawinan, yang mana disebutkan bahwa hukum dari perkawinan yaitu wajib, sunah dan haram.⁷ Perkawinan dikatakan haram ketika seseorang baik suami maupun istri tidak menjalankan kewajiban selayaknya sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga.⁸ Persoalan perkawinan sangat mencakup terhadap beberapa hubungan, terutama dalam hubungan mengenai

⁵ Wahyu Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam*. Dalam Jurnal Ta'alim, Vol. XIV, No. 2. 2016, hal 189

⁶ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 4

⁷ Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam. Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Yogyakarta: BPFE. 1984) , hal 1

⁸ Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Hidakarya Agung) , hal 3

kehidupan manusia, dimana setiap individu akan memiliki perasaan emosi sehingga mudah dalam rumah tangga timbul perselisihan, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan kepastian hukum.

Tujuan dari perkawinan yaitu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t sehingga mendapatkan keturunan yang telah disebutkn di dalam agama.⁹ Maka dari itu, antara suami dan istri perlu membangun sifat saling memahami antara satu dengan yang lain, agar mencapai kesejahteraan baik dari segi spiritual maupun material. Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiyat antara pria dengan wanita, serta menjauhkan dari perzinahan.¹⁰

Pada dasarnya dari semua tujuan perkawinan yang terlaksana, hanya satu tujuan yang akan dicapai yaitu menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah dan wa rahmah* yang mana dalam keluarga terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga timbul kenyamanan didalamnya, dalam hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran Q.S. Ar-Ruum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.s. Ar-Ruum:21)¹¹

⁹ Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam. Hukum Perkawinan Dalam Islam.* (Yogyakarta: BPFE. 1984), hal 7

¹⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia.* (Bandung: Mandar Maju. 1990) , hal 22

¹¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif).* (Yogyakarta: Teras. 2011), hal 39

Perkawinan memang ditujukan untuk selama-lamanya, namun dalam perkawinan pasti terdapat sebab-sebab yang mana dapat menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Sehingga terpaksa untuk putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian yang dialami antara suami dan istri. Ada juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian tersebut terjadi.¹²

Kehidupan rumah tangga suami istri tidak selamanya berjalan mulus, karena dalam perkawinan itu menyatukan antara dua batin menjadi satu, sehingga akan ada kemungkinan terjadinya salah faham antara suami dengan istri, bisa saja salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan, atau keduanya tidak saling percaya antara satu dengan yang lain.¹³

Telah dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap usaha untuk tidak menghargai suatu hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci oleh Allah s.w.t, hal tersebut termasuk dengan merusak kebahagiaan sehingga tidak akan mendapatkan manfaat dalam rumah tangga. Maka dari itu, ketika suami dan istri terlibat perselisihan, adakalanya dibicarakan secara baik-baik terlebih dahulu, agar dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu perceraian.¹⁴

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak ditemukannya jalan keluar, sehingga rumah tangga dirasa tidak dapat untuk dipertahankan lagi keutuhannya, jika hubungan perkawinan akan dipaksakan untuk bertahan maka kemudharatan yang akan terjadi.¹⁵ Adanya perceraian maka akan melahirkan sebuah permasalahan yang akan

¹² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 103

¹³ Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1974), hal 157

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: Teras. 2011), hal 84

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2006), hal 190

dihadapi yaitu mengenai harta, hak asuh anak, serta status dari pernikahan, sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinya, diantaranya yang berbunyi:

- a. Sebagai orang tua harus tetap mengingat mengenai kewajibannya dalam menjaga dan memberikan pendidikan terhadap anaknya, berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan terhadap pengasuhan anak, maka keputusan akan diberikan oleh pengadilan.
- b. Bapak sebagai suami tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya, yaitu berupa memberikan biaya penuh atas pendidikan serta kesehatan anak.
- c. Pada saat sahnya perceraian maka pengadilan akan mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan serta menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁶

Saat ini Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19, dimana dengan adanya Pandemi Covid-19 saat ini sudah mengorbankan banyak hal, baik dari faktor kesehatan maupun faktor ekonomi. Pandemi Covid-19 juga telah membuat beberapa kota menjadi lebih sepi dari biasanya, karena beberapa tempat hiburan dipaksakan untuk tutup sehingga tidak beroperasi lagi demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Dalam permasalahan ini, pemerintah telah menetapkan kegiatan “*Social Distancing*” dan “*Stay at Home*” sehingga penyebaran virus ini tidak semakin meluas.

Tidak hanya pada faktor ekonomi saja yang mengalami penurunan, akibat dari tutupnya beberapa tempat usaha dan tempat hiburan, namun juga faktor pendidikan terkena dampak dari Pandemi Covid-19, pemerintah memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah untuk memberlakukan proses pendidikan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

¹⁶ Nunung Rodliyah. *Akibat Hukum perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. V, No. 1. Maret. 2014

Adanya Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup luas bagi negara, terutama terhadap penunjang ekonomi masyarakat. Karena beberapa tempat usaha diharuskan tutup, bahkan banyak sekali perusahaan maupun tempat umum yang mengalami kebangkrutan serta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran ini kebanyakan yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang menjadi kepala rumah tangga atau tulang punggung keluarga, karena dengan kejadian ini mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terutama dalam rumah tangga yang mana suami sebagai kepala keluarga harus memberikan nafkah penghidupan untuk istri dan anaknya.

Dalam kondisi ini dimana susah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga sehingga istri selalu menuntut untuk suami agar dapat menghidupi serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu tidak banyak dari pasangan suami istri yang lebih memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dengan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Kasus ini lebih banyak didominasi oleh pihak istri, karena dengan alasan suami terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya dimana pada kondisi ini semua bahan pokok semakin melonjak. Oleh karena itu banyak pihak istri yang merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang serba pas-pasan dan selalu dihadapkan dengan perselisihan, maka mereka lebih memilih untuk bercerai.

Seperti dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta, salah satunya yaitu pada perkara Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska. dalam kasus ini disebutkan bahwa surat perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap pihak suami dengan alasan karena tidak terpenuhinya nafkah oleh pihak suami terhadap pihak istri.

Dalam kasus ini yang menjadi permasalahan diajukannya gugatan perceraian tidak hanya mengenai faktor ekonomi, namun antara suami dan istri sering mengalami perselisihan dalam rumah tangga sebelum

dikaruniainya seorang anak, namun suami juga telah membiarkan dan tidak mempedulikan istri selama 1 (satu) tahun lamanya. Tidak hanya itu, pihak suami juga telah melanggar sighat talik talak yang telah diucapkan saat melakukan akad. Oleh karena itu, pihak istri merasa tidak ridho atas perbuatan suami yang melanggar sighat talik talak yang diucapkan saat melakukan akad.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- a. Perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belak pihak namun tidak menemukan hasil yang baik.
- b. Perceraian tersebut dilakukan berdasarkan dengan alasan yang telah memenuhi dan sesuai dengan fakta.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai tata cara perceraian didepan sidang pengadilan.¹⁷

Jadi, dalam ketentuan peraturan yang mengatur tentang perkawinan diatas dimana mempunyai prinsip untuk memperketat serta mempersempit mengenai terjadinya kasus perceraian, bahwa dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan disertai dengan alasan-alasan penunjang terjadinya perceraian, dan telah disebutkan bahwa dalam perceraian terdapat dua macam yaitu, cerai talak dan juga cerai gugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah tercantum diatas maka penulis meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DENGAN TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH DI MASA PANDEMI COVID19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)

¹⁷ Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka telah disusun mengenai rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tersusun, maka penulis menjelaskan mengenai tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai putusan majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surakarta.
- b. Untuk mengetahui bahwa dapatkah Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah.

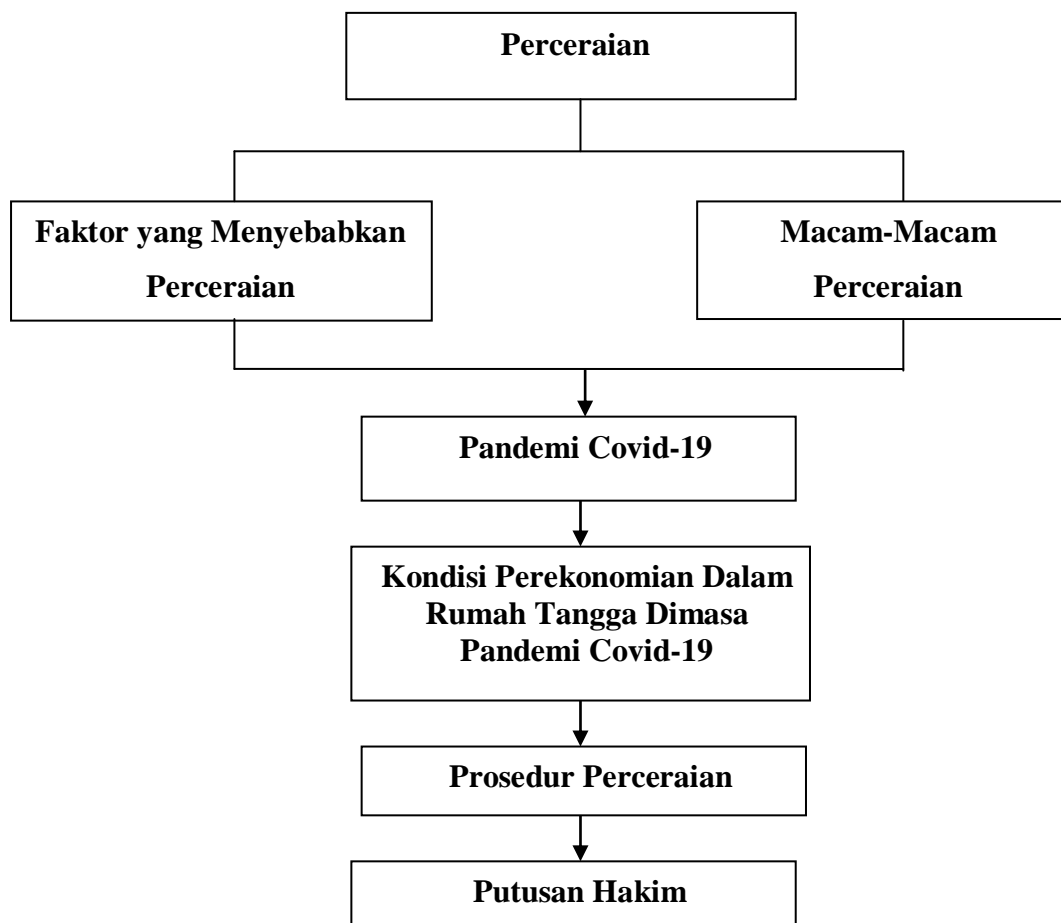
D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, telah dijelaskan mengenai tujuan penelitian secara jelas, penulis juga mengharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Islam.
- b. Dapat digunakan untuk menambah pola pikir, bahan bacaan serta literatur mengenai perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah di masa Pandemi Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran yang mana telah memuat mengenai uraian tentang teori atau konsep yang berasal dari buku-buku maupun referensi yang mana sebagai panduan untuk penulis dalam memahami serta menganalisis sebuah penelitian.¹⁸ Pada kasus perceraian yang terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah di masa Pandemi Covid-19, sebagaimana uraian dalam latar belakang masalah dan ilustrasi kasus, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jumlah angka perceraian di Indonesia yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun pasti mengalami peningkatan, terutama untuk

¹⁸ Prof. Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010), hal 33

kondisi sekarang dimana sedang dilanda Pandemi Covid-19. Perceraian terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi. Sehingga dalam mengajukan perceraian pasti terdapat alasan atau penyebab yang mendasari perceraian tersebut diajukan.

Perceraian memang hukumnya sah dalam Islam namun perceraian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan dalam melakukan perceraian. Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa perceraian juga dapat dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Terutama dengan adanya Pandemi Covid-19 dimana semuanya serba terbatas bahkan menjadi kekuarang, terutama dalam hal perekonomian dalam masyarakat juga semakin menurun. Sehingga menyebabkan kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini pasti akan timbul perselisihan antara suami dengan istri dengan permasalahan ekonomi tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menyelesaikan hubungan mereka dengan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Perceraian sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan di depan sidang pengadilan, dalam sidang pengadilan perceraian akan diputus apabila antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Telah disebutkan mengenai beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara pasangan suami yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah moral;
- b. Meninggalkan kewajiban;
- c. Menyakiti jasmani atau rohani;
- d. Terus menerus berselisih paham.²⁰

¹⁹ Fatihudiin Abul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*. (Surabaya: Terbit Terang. 2006), hal 40

²⁰ Abdullah Gofar. *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama*. November 2012.

Perceraian sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu cerai gugat dan cerai talak.²¹ Cerai gugat merupakan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh pihak istri. dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai tata cara gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami di Pengadilan Agama.²²

Sedangkan cerai talak yaitu dimana pihak suami yang melakukannya, dimana pihak suami mengucapkan ikrar talak ketika istri telah melanggar kewajiban dan durhaka terhadap suami, maka suami berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah penelitian, maka akan dipercayai mengenai kebenarannya apabila telah tersusun dengan metode yang sesuai. Metode adalah pemahaman obyek serta pedoman dari sebuah cara ilmuwan dalam memahami keadaan yang dihadapi.²³

Dalam menyusun penelitian ini yang mana sangat memerlukan data agar dalam menganalisis suatu penelitian dapat menghasilkan penelitian yang lebih valid. Dalam hal ini metode yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data dasar dalam penyelesaian penelitian hukum.

²¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta : Teras. 2011). hal 78

²² Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986), hal 6

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian hukum terhadap norma sebagai bahan pustaka untuk melakukan penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai keadaan atau gejala yang terjadi dalam individu maupun kelompok di masyarakat.²⁴

4. Jenis Data

Penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yang mana data ini diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara maupun literatur-literatur yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah berupa putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surakarta, yang mana berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah di masa Pandemi Covid-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa buku maupun literatur pendukung, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai perceraian

²⁴ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2016), hal 191

dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah di masa Pandemi Covid-19.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penulisan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang mana merupakan penelitian normatif, maka dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data-data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan serta wawancara kepada Hakim untuk memperkuat hasil penelitian dan pembahasan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam pengumpulan data sesuai dengan uraian dasar, sehingga dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti secara normatif kualitatif. Dalam hal ini penulis mampu memahami data dari segi aspek hukum, asas-asas yang ada, serta perbandingan hukumnya.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yang mana hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), hal 77

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang uraian mengenai deskripsi dari bahan teori, doktrin, pendapat dari pengemuka terdahulu serta kajian yuridis yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai uraian penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian hukum Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran yang mana hal tersebut berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.